



Kelas XII

SEJARAH INDONESIA

Perjuangan Menghadapi Pergolakan dalam Negeri

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mempunyai kemampuan sebagai berikut ini.

1. Mampu memahami pemberontakan PKI Madiun.
2. Mampu memahami pemberontakan DI/TII.
3. Mampu memahami pemberontakan APRA.
4. Mampu memahami pemberontakan Andi Aziz.
5. Mampu memahami pemberontakan Republik Maluku Selatan.
6. Mampu memahami pemberontakan PRRI/Permesta.
7. Mampu memahami pemberontakan G30S/PKI.

A. Pemberontakan PKI Madiun

1. Latar Belakang

Penandatanganan Persetujuan Renville berdampak pada jatuhnya Kabinet **Amir Syarifuddin** karena persetujuan Renville dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Hasil persetujuan Renville membuat posisi Indonesia bertambah sulit. Wilayah Republik Indonesia juga semakin berkurang sehingga wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit.

Pengganti kabinet Amir Syarifuddin adalah Kabinet Hatta yang memerintah sejak 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949. Dalam Kabinet Hatta, perwakilan dari golongan komunis tidak ada. Hal ini menjadi salah satu faktor kaum komunis menjadi oposisi pemerintah Indonesia pada masa Kabinet Hatta. Salah satu tokoh oposisi pemerintah adalah Amir Syarifuddin. Setelah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, untuk memperkuat sikap oposisinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

FDR didukung oleh organisasi komunis seperti Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).



Gambar 1. Musso, salah seorang pemimpin pemberontakan PKI Madiun

Sumber: *id.wikipedia.org*

Pada 11 Agustus 1948, salah seorang tokoh Komunis, yaitu **Musso**, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Amir Syarifuddin dan Musso kemudian menggabungkan kekuatan. Kedatangan Musso membawa pemikiran baru mengenai perjuangan kaum komunis yang disebut “Jalan Baru”.

Musso menginginkan agar dibentuk kerja sama untuk menentang politik anti-imperialism yang dipimpin oleh kaum komunis. Oleh sebab itu, banyak organisasi berhaluan komunis melebur dalam PKI.

Sasaran Musso adalah Kabinet Hatta karena dinilai menjual Indonesia dengan menjalankan persetujuan Renville dan pelaksanaan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang Indonesia. Namun, Kabinet Hatta tidak goyah sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti PNI, Masyumi, dan organisasi pemuda pimpinan **Latuharhary**.

Selain itu, kelompok PKI juga melakukan aksi-aksi seperti berikut ini.

- a. Melancarkan propaganda antipemerintah.
- b. Mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan.
- c. Melakukan pembunuhan-pembunuhan, misalnya **dr. Muwardi** dan Gubernur Jawa Timur **Suryo**.

Usaha PKI untuk merebut pemerintahan Indonesia dimulai dengan menciptakan kekacauan di Surakarta. Insiden di Surakarta dapat diselesaikan oleh **Kolonel Gatot Subroto**. Namun, kekacauan di Surakarta adalah pengalihan perhatian yang dilakukan PKI sebab kelompok PKI mendirikan basis kekuatan di Madiun. Pada 18 September 1948 di Madiun terjadi beberapa insiden dan kemudian Musso mengumumkan berdirinya “Republik Soviet Indonesia”. Pihak pemberontak berhasil menguasai Kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda.

Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis.

2. Akhir Pemberontakan

Dalam usaha mengatasi pemberontakan PKI, pemerintah melakukan beberapa cara berikut ini.

- a. Pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat: ikut Muso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta.
- b. Presiden menginstruksikan **A.H. Nasution** untuk memimpin strategi penumpasan PKI Madiun. Penyerangan di bawah pimpinan **Kolonel Sadikin** dan **Kolonel Sungkono**. Selain unsur TNI, unsur Polri pun ikut terlibat dalam upaya penumpasan PKI Madiun.

Dengan bantuan rakyat, pada 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI. Dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi kemudian ditembak mati. Selanjutnya, dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah yang terdapat pengaruh PKI. Operasi pembersihan PKI dinyatakan selesai pada awal bulan Desember 1948.

B. Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

1. Definisi Darul Islam

Darul Islam yang berarti 'rumah Islam' merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai hukum tertinggi dalam negara tersebut. Selanjutnya, hukum Islam juga berpengaruh dalam setiap kehidupan penduduknya seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah ada usaha pembentukan Darul Islam dalam pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh **Kartosuwiryo**.

2. Konsep Negara Islam Indonesia

Negara Islam Indonesia (NII) merupakan usaha politik dari DI/TII untuk membentuk negara Islam di Indonesia. NII diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosuwiryo bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Hukum yang berlaku dalam NII bentukan Kartosuwiryo adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis.

Pembentukan NII menunjukkan dengan tegas bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang yang berlandaskan ajaran Islam dan menolak hukum dan ideologi selain Al-Quran dan Hadis.

3. Pergerakan Pemberontakan

Pemberontakan DI/TII dimulai dari Jawa Barat setelah perundingan Renville. DI/TII di Jawa Barat berada di bawah pimpinan Sekarmaji Marjjan Kartosuwiryo. Pada

masa pendudukan Jepang, Kartosuwiryo dikenal sebagai anggota Masyumi dan mempunyai cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. Selain itu, Kartosuwiryo juga dikenal sebagai pemimpin laskar Hizbullah dan Sabilillah yang bermarkas di Jawa Barat dan ikut bergerilya melawan Belanda.

a. Latar Belakang

Pemberontakan DI/TII bermula dari kekecewaan Kartosuwiryo dan Laskar Hizbullah dan Sabilillah terhadap hasil perundingan Renville. Adapun hasil perundingan Renville mengharuskan unsur pejuang Indonesia baik dari TNI maupun laskar rakyat untuk mengosongkan daerah gerilyanya. Di Jawa Barat TNI telah mengosongkan wilayah gerilyanya, namun Kartosuwiryo beserta laskarnya enggan mengosongkan dan tetap bertahan di Jawa Barat.

Kartosuwiryo merasa kecewa. Hal ini menyebabkan ia tidak mengakui lagi pemerintahan Indonesia dan merencanakan pemberontakan. Adapun wujud dari rencana Kartosuwiryo adalah sebagai berikut.

- 1.) Memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat dan mengangkat dirinya sebagai Imam.
- 2.) Mengadakan pertempuran dengan TNI dari Divisi Siliwangi dengan maksud menahan kedatangan Divisi Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat dari hijrah ke Yogyakarta.



Gambar 2. Kartosuwiryo, Pemimpin DI/TII di Jawa Barat
Sumber: *id.wikipedia.org*

b. Operasi Penumpasan

Pemerintah Indonesia mulai melakukan operasi penumpasan DI/TII Jawa Barat pada 1960 melalui operasi Pagar Betis dengan dukungan dari rakyat setempat untuk mengepung tempat persembunyian Kartosuwiryo. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak DI/TII. DI/TII di Jawa Barat berakhir ketika Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Jawa Barat melalui operasi Bharatayudha dan dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada 5 September 1962.

Selain di Jawa Barat, DI/TII juga menyebar ke berbagai daerah seperti di Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

4. DI/TII Aceh

DI/TII Aceh dipimpin oleh **Daud Beureuh** yang sebelumnya dikenal sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh selama Agresi Militer Belanda I pada 1947.

a. Latar belakang

Bermula dari kekecewaan Daud Beureuh yang menentang turunnya status Aceh

yang sebelumnya menjadi daerah menjadi karesidenan Provinsi Sumatra Utara. Pada 20 September 1953 Daud Beureuh mengeluarkan maklumat tentang Daerah Aceh menjadi bagian Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.

Sebagai mantan Gubernur Militer, sepak terjang Daud Beureuh cukup dikenal sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari pengikut Daud Beureuh.

b. Operasi Penumpasan

Pemberontakan ini dapat dihentikan melalui dua cara, yaitu:

- 1.) mengadakan operasi militer yang bertujuan menghancurkan kekuatan bersenjata DI/TII;
- 2.) mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh dengan pendekatan persuasif untuk menghindari kesalahpahaman.

Pemberontakan DI/TII berakhir melalui penyelenggaraan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atas inisiatif Kolonel **M. Jasin** pada 17–28 Desember 1962. Musyawarah ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh masyarakat Aceh dan berhasil memulihkan keamanan di Aceh.

5. DI/TII Kalimantan Selatan

Pengaruh DI/TII juga meluas hingga Kalimantan Selatan. DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh **Ibnu Hajar**, mantan pejuang kemerdekaan Indonesia yang berpangkat letnan dua.

a. Latar Belakang

Munculnya DI/TII di Kalimantan Selatan disebabkan 2 hal berikut ini.

- 1.) Adanya anggapan diskriminasi perlakuan antara tentara di luar Pulau Jawa dengan tentara di dalam Pulau Jawa.
- 2.) Gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak reorganisasi dan rasionalisasi mendapatkan pesangon yang kecil sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak menghargai perjuangan para gerilyawan Kalimantan.

Oleh sebab itu, Ibnu Hajar yang melihat ketidakadilan ini, membentuk kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT) dan menyatakan KRYT bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada akhir 1954. Sebagai wujud dari pernyataannya, Ibnu Hajar beserta KRYT mulai melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

b. Upaya Penumpasan

Upaya pemerintah pusat dalam menangani masalah DI/TII Kalimantan Selatan dilakukan dua cara, yaitu:

- 1.) pemberian kesempatan pada Ibnu Hajar dan KRYT untuk menyerah secara damai, namun gagal karena dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk memperoleh senjata;

2.) operasi militer yang berhasil menghancurkan kekuatan DI/TII di Kalimantan Selatan pada tahun 1959.

Ibnu Hajar beserta kelompoknya secara resmi menyerah pada 1963 dan setelah diadili oleh Mahkamah Militer, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965.

6. DI/TII Jawa Tengah

DI/TII di Jawa Tengah terjadi di daerah Brebes-Tegal yang dipimpin oleh **Amir Fatah** dan Kebumen yang dipimpin oleh **Mahfudh Abdul Rahman** yang lebih dikenal sebagai Kyai Sumolangu.

Tujuan pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah adalah mendirikan negara yang berlandaskan hukum Islam.

a. Latar Belakang

Amir Fatah dikenal sebagai komandan laskar Hizbullah di Mojokerto, Jawa Timur. Amir Fatah kemudian menggabungkan diri ke dalam TNI untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Namun, Amir Fatah memiliki keinginan mendirikan negara Islam dan berhasil memengaruhi beberapa kesatuan TNI. Setelah banyak anggotanya, Amir Fatah beserta pengikutnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949 di Tegal, Jawa Tengah.

Selain keinginan untuk mendirikan negara Islam, beberapa anggapan penyebab Amir Fatah melakukan pemberontakan adalah sebagai berikut.

- 1.) Pengaruh kaum sosialis-komunis di pemerintah dan TNI yang mengganggu perjuangan umat Islam.
- 2.) Perjuangan Amir Fatah dianggap tidak dihargai pemerintah dengan cara memberikan daerah pertahanannya di Brebes-Tegal kepada TNI.
- 3.) Adanya perintah penangkapan Amir Fatah oleh Mayor Wongsoatmojo.

Di Kebumen, Jawa Tengah juga terdapat kelompok serupa bernama Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu. Walaupun berbeda organisasi, namun kedua kelompok ini saling bekerja sama karena memiliki tujuan yang sama.

Pada 1952, DI/TII Jawa Tengah semakin kuat dengan dukungan dari batalyon 426 dari Kudus dan Magelang.

b. Upaya Penumpasan

Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas kekuatan DI/TII Jawa Tengah. Diawali dengan pembentukan Pasukan Khusus Banteng Raiders

yang mengadakan Operasi Gerakan Banteng Negara yang dipimpin secara bergantian oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bacrhun dan Letkol. Ahmad Yani untuk menumpas kekuatan DI/TII Jawa Tengah. Kekuatan DI/TII Jawa Tengah dapat dihancurkan pada tahun 1954.

7. DI/TII Sulawesi Selatan

a. Latar Belakang

DI/TII Sulawesi Selatan dipimpin oleh **Abdul Kahar Muzakar**. Latar belakang gerakan DI/TII Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Keinginan Kahar Muzakar agar organisasi perjuangan bentukannya yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) masuk ke dalam APRIS tanpa melalui seleksi dengan nama Brigade Hassanudin.



Gambar 3. Kahar Muzakar
Sumber: id.wikipedia.org

Keinginan Kahar Muzakar ditolak oleh pemerintah dan untuk menghindari kekecewaan pemerintah memasukan semua anggota KGSS dalam Corps Tjadangan Nasional (CTN) dan pangkat Kahar Muzakar diangkat menjadi Letnan Kolonel. Namun, hal ini juga tidak memuaskan Kahar Muzakar karena Letkol Warow yang diangkat menjadi anggota CTN.

Pada 17 Agustus 1952, Kahar Muzakar beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan dan pada 1952, Kahar Muzakar menyatakan bergabung dengan DI/TII Kartosuwiryo.

b. Upaya Penumpasan

Operasi penumpasan dimulai pada 3 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Namun, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menumpas pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar. Hal ini disebabkan oleh:

- 1.) medan yang sulit serta dikuasai oleh Kelompok Kahar Muzakar;
- 2.) kelompok Kahar Muzakar memanfaatkan rasa kesukuan untuk menghalangi operasi penumpasan dari pemerintah pusat.

Namun, akhirnya pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di Sulawesi Selatan.



SUPER "Solusi Quipper"

Ingatlah pemimpin pemberontakan DI/TI sebagai berikut.

AMIR dari JATENG punya KAMUZ bahasa SULSEL dibawa IBNU ke KALI Selatan tempat DAUD biasa makan mi ACEH

DI/TII Jawa Tengah: Amir Fatah

DI/TII Sulawesi Selatan: Kahar Muzakar

DI/TII Kalimantan Selatan: Ibnu Hajar

DI/TII Aceh: Daud Beureuh

C. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

1. Latar Belakang

Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh **Kapten Westerling**. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tenteram serta memerintah dengan adil dan bijaksana.

Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara - negara bagian RIS.

2. Raymond Westerling

Pemimpin APRA adalah salah seorang tentara Belanda yaitu Raymond Westerling. Selain terlibat dalam pemberontakan APRA, Westerling juga bertanggung jawab atas pembantaian di Sulawesi Selatan pada tahun 1946-1947. Selama dinas ketetentaraan Belanda, Westerling menjabat sebagai komandan Depot Speciale Troepen (DST) yang kemudian berubah menjadi Korps Speciale Troepen (KST) dengan pangkat kapten.

Setelah dinonaktifkan sebagai tentara Belanda, Westerling menggalang kekuatan untuk membentuk APRA dan mengadakan teror di Jawa Barat.



Gambar 4. Raymond Westerling
Sumber: id.wikipedia.org

3. Jalannya Pemberontakan

Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan. Isi dari ultimatum tersebut adalah APRA menuntut diakui sebagai tentara Pasundan. Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung dan berhasil menduduki Markas Divisi Siliwangi. Selama penyerangan ini, APRA membunuh setiap APRIS yang ditemui. Akibatnya sekitar 79 anggota APRIS gugur termasuk Letnan Kolonel Lembong.

4. Penumpasan Pemberontakan

Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas APRA di Bandung, yaitu:

- a. melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda untuk menghentikan gerakan Westerling;
- b. melakukan operasi militer.

Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat dilumpuhkan. Kemudian diketahui, bahwa dalang gerakan APRA adalah **Sultan Hamid II**, seorang Menteri Negara pada Kabinet RIS. Rencana sebenarnya dari gerakan itu adalah menculik Menteri Pertahanan Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sekjen Pertahanan Mr. Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Dengan keberhasilan pasukan APRIS menumpas Gerakan APRA, maka keamanan di wilayah Jawa Barat berhasil dipulihkan kembali.

D. Andi Aziz

1. Latar Belakang Pemberontakan Andi Aziz

Pemberontakan Andi Aziz berawal dari kekacauan dan bentrokan antara kelompok prorepublik dan profederal di Sulawesi Selatan. Pemerintah RIS kemudian mengirim pasukan TNI untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok federal.

Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari eks KNIL juga mengusulkan terhadap pemerintah Indonesia agar mereka dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT) dan menolak kedatangan pasukan TNI. Mereka meminta kepada pemerintah agar bertanggung jawab penuh terhadap keamanan di NIT.

2. Andi Azis



Gambar 5. Andi Azis
Sumber: *id.wikipedia.org*

Andi Azis lahir di Simpangbinangal, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Sejak usia 11 tahun, ia sudah tinggal di Belanda, disekolahkan oleh seorang mantan Asisten Residen asal Belanda yang menjadikannya anak angkat. Ketika Belanda diduduki tentara Jerman, ia tergabung dalam tentara bawah tanah melawan Jerman. Pada 19 Januari 1946, Andi Azis bersama pasukan Inggris tiba bersama pasukan Inggris di Jakarta. Pada tahun 1947, ia sekolah di Sekolah Perwira Infanteri di Bandung. Setelah lulus, ia sempat menjadi ajudan muda Presiden NIT.

Di Makassar, ia menjadi perwira KNIL yang tangguh. Sebagai ajudan presiden, Andi Azis dikenal luas oleh pejabat NIT, termasuk Jaksa Agung NIT, Soumokil. Sebelum 1950, ia menjadi komandan kompi dengan pangkat Letnan Satu dan membawahi 125 KNIL.

3. Jalannya Pemberontakan

Kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Azis. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Azis menduduki beberapa tempat penting pemerintahan, seperti kantor telekomunikasi beberapa perwira juga ditahan, termasuk Letnan Kolonel **A.J. Mokoginta** dan beberapa prajurit TNI lainnya pun menjadi korban. Pemerintah pun bertindak dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Gerakan Andi Azis ini sendiri tidak disetujui oleh Perdana Menteri NIT, **Ir. Diapari**, sehingga ia mengundurkan diri dan digantikan oleh **Ir. Putuhena**. Selanjutnya diumumkan bahwa NIT akan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal ini semakin meningkatkan keinginan Andi Azis untuk mempertahankan NIT.

4. Penumpasan Pemberontakan

Pada 8 April 1950, pemerintah meminta Andi Azis melapor ke Jakarta dan menarik pasukannya dalam tenggat waktu 4 x 24 jam. Namun, Andi Azis tidak segera melapor. Ia baru menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta dan dibawa ke Jakarta pada 15 April 1950 untuk diadili. Untuk menumpas sisa-sisa gerakan Andi Azis, pemerintah pun mengirim pasukan dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada 16 April 1950.

E. RMS (Republik Maluku Selatan)

Pemberontakan ini dipimpin oleh **Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil** bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT).

1. Latar Belakang

Dr. Soumokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, Soumokil juga tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah NIT menjadi kekuasaan RIS dan berusaha melepaskan wilayah Maluku dan NIT dari RIS. Kemudian pada 25 April 1950, Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS).



Gambar 6. Bendera RMS
Sumber: *id.wikipedia.org*

Upaya mengatasi RMS, pemerintah RIS melakukan dua cara berikut.

- a. Jalan damai dengan mengirim Dr. J. Leimena yang juga berasal dari Maluku untuk berunding. Namun, usaha ini mengalami kegagalan.
- b. Pelaksanaan ekspedisi militer pada 14 Juli 1950. Pimpinan ekspedisi adalah Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur) secara perlahan wilayah-wilayah gerakan RMS berhasil dikuasai kembali oleh pasukan APRIS. Beberapa anggotanya melarikan diri ke negeri Belanda. Pemberontakan ini dapat ditumpas secara keseluruhan pada November 1950 dengan jatuhnya Ambon ke tangan APRIS. Namun, penumpasan RMS dibayar mahal dengan gugurnya Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

Dr. Soumokil melarikan diri ke Pulau Seram dan baru dapat ditangkap di Pulau Seram pada 2 Desember 1962. Dr. Soumokil diadili oleh pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

2. Pengasingan Pemimpin RMS

Setelah penumpasan RMS di Ambon, pemerintah Indonesia memberi kesempatan para pemimpin dan pendukung RMS untuk menghentikan kegiatannya dan menyerahkan diri. Namun, dengan banyaknya penangkapan aktivis RMS, tokoh-tokoh RMS seperti **Johan Manusama** dan pendukung RMS mengungsi ke Belanda. Gelombang pengungsian RMS dimulai pada tahun 1950 dan berjumlah sekitar 12.000 jiwa.

Pengungsian ini didukung penuh oleh Belanda. RMS mulai membentuk pemerintahan pengasingan di Belanda pada tahun 1966 dengan Presidennya Prof. Johan Manusama yang memerintah tahun 1966 hingga 1993.

Namun di Belanda, RMS juga melakukan serangkaian tindakan teror. Tindakan ini dianggap sebagai wujud rasa frustrasi karena kurangnya dukungan Belanda dalam menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Beberapa tindakan teror tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Tahun 1970: serangan di rumah Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Seorang polisi Belanda ditembak dan tewas.
- b. Tahun 1975: pembajakan kereta api di Wijster dan serangan di konsulat Indonesia di Amsterdam. Serangan teror ini menyebabkan tiga sandera dieksekusi di kereta dan seorang Indonesia cedera parah saat mencoba kabur dari konsulat.
- c. Tahun 1977: terjadi pembajakan kereta di De Punt yang dibarengi oleh penyanderaan sekolah dasar di Bovensmilde.
- d. Tahun 1978: balai provinsi di Assen diduduki anggota RMS dan menyandera 70 warga sipil.

Serangan-serangan ini berhasil digagalkan oleh Marinir *Bijzondere Bijstands Eenheid* (BBE).

3. Perkembangan RMS saat ini

Hingga saat ini, RMS masih ada di Belanda dengan Presidennya **John Wattilete** yang mulai memimpin pada bulan April 2010. Sepak terjang RMS sejak periode tahun 2000-an adalah berikut.

- a. Pada 29 Juni 2007, Penari Cakalele mengibarkan bendera RMS di hadapan **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono** dalam acara Hari Keluarga di Ambon.
- b. Pada Oktober 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan ke Belanda karena adanya tuntutan penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh RMS di pengadilan Den Haag dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan dan tuntutan menunjukkan makam Dr. Soumokil.

4. *The Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)*

The Unrepresented Nations and Peoples Organization (disingkat UNPO), Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tidak terwakili yang dibentuk pada 11 Februari 1991, di Den Haag.

Tujuan UNPO adalah melindungi hak kemanusiaan dan hak budaya dari anggotanya, menjaga lingkungan mereka, dan mendapatkan solusi tanpa kekerasan terhadap konflik yang dialaminya.

Beberapa wilayah Indonesia yang terdapat gerakan pemberontakan, seperti Republik Maluku Selatan yang bergabung 6 Agustus 1991 dan Papua Barat yang merupakan salah satu pendiri UNPO.

F. PRRI/Permesta

1. Arti dan Definisi PRRI

PRRI kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Keduanya merupakan gabungan gerakan pemberontakan yang ada wilayah Sumatra dan Sulawesi pada periode tahun 1956–1958.

2. Tuntutan PRRI

Setelah Pemilu I yang dilaksanakan pada 1955, situasi Indonesia semakin memburuk seperti contoh berikut ini.

- a. Pergolakan antarpolitical party politik yang menyebabkan Kabinet Parlementer tidak bisa bertahan lama.
- b. Pembangunan daerah yang tersendat akibat tidak meratanya alokasi dana pembangunan di setiap daerah.

Kekecewaan tiap daerah didukung oleh perwira militer yang kemudian membentuk dewan daerah:

- a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin **Letkol Achmad Husein** dan dibentuk 20 Desember 1956.
- b. Dewan Gajah di Medan yang dipimpin oleh **Kolonel Simbolon** dibentuk 22 Desember 1956
- c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh **Letkol Barlian** pada Januari 1957.
- d. Dewan Manguni di Manado dibentuk oleh **Letkol Ventje Sumual** pada 18 Februari 1957

Pembentukan dewan daerah ini membuat ketegangan politik di Sumatra dan Sulawesi. Usaha peredaaan ketegangan tidak menemui hasil, hal ini terlihat adanya usaha pembunuhan Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini, 30 November 1957.

Untuk meredakannya tokoh-tokoh nasional dan daerah bersepakat mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) pada 10–14 September 1957 dan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) pada tanggal 25 November – 4 Desember 1957 untuk membahas masalah dalam pemerintahan pusat dan usaha pembangunan daerah.

Pada 10 Februari 1958, **Achmad Husein** mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat di Padang, Sumatra Barat. Berikut ini adalah isi ultimatum tersebut.

- a. Dalam waktu 5 x 24 jam Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden.
- b. Mendesak Presiden Soekarno agar menugaskan Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk zaken kabinet.
- c. Meminta kepada Presiden Soekarno supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.

Walaupun bukan tuntutan untuk membentuk negara baru maupun pemberontakan, pemerintah Indonesia tetap bertindak tegas dengan cara:

- a. memecat Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek secara tidak hormat;
- b. membekukan KODAM Sumatra Tengah oleh Kasad. A.H. Nasution dan menempatkannya di bawah Kasad.

Pada 15 Februari 1958, Letkol Achmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di Padang dengan Perdana Menterinya adalah Syafruddin Prawiranegara.

3. Latar Belakang Permesta

Gerakan Permesta dideklarasikan pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Ventje Sumual di Universitas Permesta di Sario, Manado. Setelah pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan pernyataan pemutusan hubungan dengan pemerintah Indonesia dibacakan oleh **Kolonel D. J. Somba** selaku pemimpin Kodam Sulawesi Utara dan Tengah dalam rapat di Lapangan Sario, Manado. Ia membacakan teks pemutusan hubungan dengan Pemerintah Pusat.

Rakyat Sulawesi Utara dan Tengah termasuk militer, solider pada keputusan PRRI dan memutuskan hubungan dengan Pemerintah RI.

Pada awalnya berpusat di Makassar, kemudian pada 1958 dipindahkan ke Manado. Pembentukan Permesta dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut.

- a. Ketidakpuasan terhadap pemerintah karena lebih memerhatikan pembangunan di Jawa daripada di daerah khususnya Sulawesi.
- b. Tuntutan pemberian status otonomi yang luas.
- c. Menentang pengaruh komunis yang semakin meluas di Pulau Jawa.



Gambar 7. Ventje Sumual membacakan deklarasi Permesta
Sumber: *id.wikipedia.org*

Adanya kesamaan tujuan perjuangan dengan Permesta menjadikan gerakan PRRI di Sumatra yang diproklamasikan pada 1958 menjalin hubungan dengan gerakan Permesta untuk bersatu melawan Pemerintah pusat.

4. Operasi Penumpasan PRRI/Permesta

Pada awalnya ditawarkan dua cara untuk menumpas PRRI/Permesta, yaitu dengan cara berunding yang diusulkan oleh Masyumi dan PSI, sedangkan Nasution, PNI, dan PKI menginginkan penumpasan PRRI/Permesta secara tegas. Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengambil tindakan tegas untuk menumpas PRRI/Permesta melalui operasi militer. Adapun operasi militer tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penumpasan PRRI

- 1.) Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) melancarkan operasi gabungan AD, AL, dan AU dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh **Kolonel Ahmad Yani**.
- 2.) Di Sumatra Utara, Operasi Saptamarga dilaksanakan di bawah pimpinan **Brigjen Djatikusumo**.
- 3.) Di Sumatra Selatan, Operasi Sadar dipimpin **Letkol Ibnu Sutowo**. Tujuan operasi militer ini adalah menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing.



SUPER "Solusi Quipper"

Penumpasan PRRI bisa kalian ingat melalui kalimat berikut ini.

Sapi Marah ke Djati setelah IBNU SADAR tidak diajak A.yani ikut Upacara 17 Agustusan

Berangsur-angsur wilayah gerakan PRRI dapat dikuasai APRI. Pada 29 Mei 1958, Achmad Husein dan pasukannya secara resmi menyerah. Penyerahan diri itu disusul para tokoh PRRI lainnya.

b. Penumpasan Permesta

Operasi Merdeka dipimpin oleh **Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat** pada April 1958. Selain operasi merdeka, ada juga operasi militer lainnya untuk menumpas Permesta.

- 1.) Operasi Saptamarga I dipimpin **Letkol Sumarsono**, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
- 2.) Operasi Saptamarga II dipimpin **Letkol Agus Prasmono** dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.

- 3.) Operasi Saptamarga III dipimpin **Letkol Magenda** dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
- 4.) Operasi Saptamarga IV dipimpin **Letkol Rukminto Hendraningrat**, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
- 5.) Operasi Mena I dipimpin **Letkol Pieters** dengan sasaran Jailolo.
- 6.) Operasi Mena II dipimpin **Letkol Hunholz** untuk merebut lapangan udara Morotai.

Dalam upaya penumpasan ini, kekuatan militer Permesta melalui Angkatan Perang Revolusioner (APREV) berhasil dilumpuhkan dengan direbutnya kota-kota pertahanan Permesta di Sulawesi. Pada 1960, Permesta bersedia berunding dengan RI melalui **Mayjen Alex Kawilarang** dan pada 1961 Permesta dibubarkan setelah pemerintah memberikan amnesti dan abolisi.

5. Campur Tangan Bangsa Asing

Gerakan Permesta, ternyata mendapat bantuan dari pihak asing. Terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang dikemudikan oleh Alan Pope (Warga Negara Amerika Serikat), pada 18 Mei 1958 di Kota Ambon. Keterlibatan **Alan Pope** mengungkapkan bahwa Amerika Serikat melalui CIA diam-diam membantu PRRI/Permesta di Indonesia. Dengan penelusuran lebih lanjut ternyata banyak negara-negara yang terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta seperti Filipina dan Taiwan. Bantuan terhadap Permesta kebanyakan berupa bantuan senjata dan kendaraan tempur.

Terbongkarnya keterlibatan Amerika Serikat melalui penangkapan Alan Pope menyebabkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memanas, hal ini makin mendekatkan Soekarno dengan kekuatan komunis.

6. Kembalinya ke NKRI

Pada 1960, Permesta mengiriskan wakilnya, yaitu **Mayjen Alex E. Kawilarang** untuk berunding dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh **Kasad Nicholas Bondan**. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan.

Permesta dan TNI bersama-sama menghadapi kekuatan komunis di Jawa.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Keppres 322/1961 pada 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi bagi pendukung gerakan pemberontakan agar mau menyerah dan menghentikan kegiatannya. Cara ini berhasil memadamkan gerakan Permesta yang ditandai dengan banyak anggota Permesta seperti Kolonel D.J. Somba, Mayjen

Alex E. Kawilarang, Kolonel Dolf Runturambi, Kolonel Petit Muharto Kartodirdjo, dan Kolonel Ventje Sumual beserta pasukannya keluar dari hutan-hutan yang merupakan basis pertahanan PRRI/Permesta sebelumnya.

G. Pemberontakan G30S/PKI

1. Latar Belakang Pemberontakan

- a. Setelah pemberontakan PKI Madiun 1948, banyak tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menantikan waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia.
- b. Pada pemilu 1955, PKI menempati urutan ke-4 perolehan suara dan berhasil menempatkan wakil-wakilnya dalam DPR. Hal ini membuat posisi PKI semakin kuat. Ditambah lagi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang kemudian dibuat oleh Presiden Soekarno membuat PKI semakin kuat.
- c. Sejak Juli 1960, PKI sudah melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha untuk duduk dalam kabinet. Pada tahun-tahun berikutnya, PKI gencar melakukan kritik terhadap pemerintah.
- d. Memasuki tahun 1964, hubungan PKI dengan petinggi TNI AD mulai memanas. PKI mulai meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang tengah mempersiapkan kudeta. PKI menyodorkan Dokumen Gilchrist yang ditandatangani oleh duta besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ini ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi koalisi Inggris-AS dengan melibatkan TNI untuk melakukan kudeta. Suasana pertentangan PKI dan TNI AD semakin memanas memasuki tahun 1965.

2. Persiapan Pemberontakan

- a. Setelah pemberontakan PKI Madiun 1948, banyak tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow untuk bersembunyi dan menantikan waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia.
- b. Pada pemilu 1955, PKI menempati urutan ke-4 perolehan suara dan berhasil menempatkan wakil-wakilnya dalam DPR. Hal ini membuat posisi PKI semakin kuat. Ditambah lagi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang kemudian dibuat oleh Presiden Soekarno membuat PKI semakin kuat.
- c. Sejak Juli 1960, PKI sudah melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha untuk duduk dalam kabinet. Pada tahun-tahun berikutnya, PKI gencar melakukan kritik terhadap pemerintah.
- d. Memasuki tahun 1964, hubungan PKI dengan petinggi TNI AD mulai memanas. PKI mulai meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang tengah mempersiapkan kudeta. PKI menyodorkan Dokumen Gilchrist yang ditandatangani oleh duta besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ini ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi koalisi Inggris-AS dengan melibatkan TNI untuk melakukan kudeta. Suasana pertentangan PKI dan TNI AD semakin memanas memasuki tahun 1965.

3. Aksi G30 S/PKI

- a. PKI mulai melancarkan aksinya pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dipimpin oleh **Letkol Untung**. Sasaran aksi kudeta tersebut adalah perwira-perwira TNI AD yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Para perwira TNI tersebut antara lain:
 - 1.) Letjen Ahmad Yani
 - 2.) Mayjen Soeprapto
 - 3.) Mayjen M.T. Harjono
 - 4.) Mayjen S. Parman
 - 5.) Brigjen D.I. Panjaitan
 - 6.) Brigjen Soetojo Siswomihardjo
 - 7.) Jenderal A.H. Nasution
(A.H. Nasution berhasil melarikan diri, namun puterinya, Ade Irma Suryani Nasution tewas ditembak dan ajudannya, Lettu Pierre Tendean diculik dan kemudian dibunuh).
 - 8.) Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, pengawal rumah J. Leimena.
- b. Aksi G30S/PKI tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di Yogyakarta. Peristiwa ini turut menewaskan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono.



Gambar 8. Tokoh-tokoh korban penculikan dan pembunuhan G30S/PKI
Sumber: kokominfo.blogspot.com

4. Upaya Penumpasan Pemberontakan

Dalam situasi kacau pascapemberontakan, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), **Mayor Jenderal Soeharto** segera mengambil keputusan untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Soeharto pun segera menghimpun pasukan untuk menumpas pelaku pemberontakan. Ia memimpin Resimen Para

Komando angkatan Darat (RPKAD) dan Batalion 328/Kujang/Siliwangi dalam operasi penumpasan G30S/PKI. Melalui cara-cara sebagai berikut ini.

- a. Mengambil alih kembali studio RRI dan gedung telekomunikasi yang sebelumnya dikuasai PKI.
- b. Menghancurkan markas G30S/PKI di Lubang Buaya.
- c. Pada 3–5 Oktober 1965, pasukan RPKAD menemukan hingga memakamkan para jenazah korban G30S/PKI.
- d. Operasi penumpasan G30S/PKI dilanjutkan dengan menangkap tokoh-tokoh PKI dan membekukan semua kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Pada 11 Oktober 1965, Letkol Untung berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah.
- e. Menyatakan PKI dan komunisme sebagai partai dan ideologi terlarang di Indonesia.